

BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBK, meliputi :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
 - 1.2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 1.9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 1.10. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
 - 1.11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 2.1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
 - 2.2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - 2.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.

A. Program/Kegiatan Urusan Wajib :

1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
 - 1.1. Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
 - 1.2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan politik di Daerah
 - 1.3. Pembinaan aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik
2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - 2.1. Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
 - 2.2. Pelatihan fungsi intelejen bagi aparatur Kesbangpol
3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - 3.1. Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
 - 3.2. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat
 - 3.3. Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
 - 3.4. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah
 - 3.5. Penguatan nilai-nilai Pancasila
 - 3.6. Pembinaan Kader Bela Negara
 - 3.7. Revitalisasi Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
 - 3.8. Pembinaan Gampong Berwawasan Kebangsaan
4. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
 - 4.1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
5. Pendidikan Politik Masyarakat
 - 5.1 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
 - 5.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 5.3 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
- 6 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
 - 6.1 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- 7 Pengembangan Budaya dan Etika Politik
 - 7.1. Pemantauan Perkembangan Politik Daerah

8. Pembinaan Partai Politik dan Pemilu
 - 8.1. Sosialisasi Undang-Undang Politik
 - 8.2. Verifikasi bantuan Keuangan bagi Partai Politik
9. Monitoring Investasi di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi
 - 9.1. Monitoring dan indentifikasi investasi yang berkembang di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi
10. Koordinasi peran Pemda dalam mendorong stabilitas dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat di daerah
 - 10.1. Pemantauan perkembangan stabilitas dan ketersediaan sembako serta bahan bangunan
11. Fasilitasi komunikasi peningkatan peran serta apresiasi masyarakat terhadap perkembangan kesenian daerah dalam rangka ketahanan budaya
 - 11.1. Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
 - 11.2. Gelar seni budaya nusantara dan temu tokoh adat
12. Penguatan TIM Koordinasi PAKEM dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan aliran-aliran keagamaan di daerah
 - 12.1. Penguatan TIM PAKEM di daerah
13. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan
 - 13.1. Pembinaan Terhadap LSM, ORMAS dan OKP
14. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
 - 14.1. Pelatihan kewaspadaan dini bagi aparatur pemerintah dan perangkat gampong dalam menghadapi potensi ancaman
 - 14.2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah
 - 15.1. DESK PEMILU dan PEMILUKADA Kota Banda Aceh.